

**PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR**

Entang Adhy Muhtar, Sinta Ningrum, Didin Muhafidin  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
Jatinangor, Bandung 40600

**ABSTRAK**

Dengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera. Penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya.

**Kata kunci** : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesra

**THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL COORDINATION  
BY OFFICE HEAD OF BKKBN IN THE EFFORT OF PROMOTING  
THE TAKESRA/KUKESRA PROGRAM THE NON – IDT REGION IN  
DISTRICT OF WARUNG KONDANG, REGENCY OF CIANJUR**

**ABSTARCT**

By the more complex of development problem, especially in rural community, the government with various policies has implemented the various kinds of effort to empower the people to think the social – economic institution reinforcement, building and aid in the various of developmental aspects. Takesra/Kukesra program of the Governmental policy aiming at assisting. Both Pre-Well Being and Well Being I Families in order that the can be apart from their social – economic underdevelopment to be able to live more feasible and well-being. A study of the implementation of external Coordination by the Office head of BKKBN in the promoting of Takesra/Kukesra program in District Warung Kondang, Regency of Cianjur used the descriptive method. By the data Collecting technique through all literature study, interview, observation and questionnaires. So, samples are taken by the purposive sampling toward the respondent from the various of concerned working unit/department. From the result of data analysis are obtained a conclusion that the implementation of External Coordination by the Office Head of BKKBN in the Takesra/Kukesra Program in District of Warung Kondang, Regency of Cianjur, through the coordination technique has been not optimally implemented yet. It is proven either in the process of decision making or in the implementation of that Program has been not supported by all cooperatives, so that it influenced the achieved working results. So, for the policies implication can be directed from this study results, namely necessarily to be created the more constructive and integral cooperation with based on the administration/regulation of expressly duty and authority, mutual-understanding and mutual interrelatedness with the various institution and community in general.

**Keywords** : External coordination, promoting the Takesra

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang dan Masalah Penelitian**

Upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat diarahkan untuk memacu gerakan kegiatan ekonomi rakyat. Menurut Gunawan Sumodiningrat (1996:5) ada lima faktor penting yang dapat mendukung terhadap upaya pemberdayaan melalui penggerakan kegiatan ekonomi rakyat. Pertama, dana sebagai modal usaha; kedua, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan

kegiatan sosial ekonomi rakyat; ketiga, penyediaan sarana untuk memperlancar sarana produksi barang dan jasa masyarakat; kelima, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. Pengertian mekanisme pembentukan modal meskipun dengan bahasa yang sangat sederhana perlu ditanamkan sejak dini kepada seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Dari hasil pendataan keluarga sejahtera yang dilakukan pada tahun 1995 diperoleh data bahwa 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan yaitu mereka yang dikatakan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu para keluarga tersebut agar mereka dapat lepas dari keterbelakangan sosial, ekonomi dan budaya. Pemerintah telah memberikan petunjuk bahwa keluarga-keluarga yang tinggal di Desa Tertinggal akan dibantu melalui Program IDT, sedangkan keluarga-keluarga yang tinggal di desa yang tidak mendapat dukungan Program IDT, mereka ini akan dibantu melalui program Keluarga Sejahtera. Melalui program ini para keluarga yang masih tergolong Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera agar memiliki wawasan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi sifat hemat, perencanaan kedepan dan mampu mengumpulkan modal kerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN bekerjasama dengan P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan P.T. Pos Indonesia (Persero) menyelenggarakan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).

Dalam kaitannya dengan program tersebut, BKKBN mempunyai tugas pokok melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan Gerakan Keluarga Berencana Nasional, merumuskan kebijakan umum Pengelolaan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait (butir 7). Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan pembinaan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional dan Pengembangan Pelaksanaan Kebijakan fisik dan non fisik Keluarga Sejahtera dan Pengembangan kebijaksanaan Kependudukan. Salah satu bentuk koordinasi dalam melaksanakan gerakan pembangunan keluarga sejahtera terkait adalah program "Tabungan Keluarga Sejahtera dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera" (Takesra dan Kukesra). Namun dalam kenyataannya, untuk mencapai target program Takesra/Kukesra tersebut ditemukan beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan segi pengelolaannya antara lain:

1. Penyaluran pencairan dana Kukesra masih mengalami keterlambatan, sehingga penyerapan Dana Kukesra untuk tahap I masih dibawah pencapaian target yang diharapkan.

2. Dalam hal pengembalian angsuran masih terdapat kelompok-kelompok Kukesra yang belum bisa atau terlambat mengembalikan angsurannya. Hal ini mengakibatkan rasio tunggakan akan bertambah besar.

Adanya realisasi Dana Kukesra Tahap I dan pengembalian angsuran Kukesra belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan diduga disebabkan oleh koordinasi antara instansi yang terkait belum optimal. Hal ini dapat terlihat diantaranya dengan adanya tunggakan-tunggakan Kukesra pada kelompok diakibatkan oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pokjanis yaitu : Kantor BKKBN, Bank BNI, PT. Posindo dan unsur terkait lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti (1) Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra dan Kukesra dan hasil yang telah dicapai di Kec. Warung Kondang Kab. DT. II Cianjur. (2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program Takesra dan Kukesra, dan upaya apa saja yang telah ditempuh oleh Kepala Kantor BKKBN untuk mengatasi hambatan tersebut.

### **Tinjauan Pustaka**

Koordinasi di dalam kegiatan pemerintah yang memiliki tugas lintas sektoral merupakan fungsi yang amat penting. Dengan adanya koordinasi diharapkan setiap keputusan dan pelaksanaan program akan sinkron, selaras dan dapat dihindari terjadi duplikasi tugas/wewenang dan masing-masing unit atau instansi tersebut.

Mc. Farland (1959:268) mendefinisikan koordinasi sebagai "*Coordination is the process where by an executive depelove an orderly patterns of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose*".

Koordinasi merupakan suatu teknik untuk mempersatukan sejumlah keahlian dan perhatian (*skill and interest*) yang saling bertentangan dan menyimpang kearah tujuan bersama. Dikatakan juga merupakan "centripetal force" dalam administrasi, sebab dengan adanya keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya dari semua pemegang fungsi (unit atau instansi) akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh, sehingga kelemahan organisasi akan teratasi.

Koordinasi pada dasarnya bisa dimulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan mengendalikan. Dan koordinasikan ini diarahkan pada 2 hal, yaitu koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal di lakukan oleh atasan langsung terhadap anggota organisasi (bawahannya) sedangkan koordinasi eksternal lebih diorientasikan pada pimpinan dari berbagai instansi lainnya. Seperti dikatakan Dann Sugandha bahwa :

"Koordinasi eksternal yaitu koordinasi antara pejabat dari berbagai organisasi atau antar Organisasi". (Dann Sugandha, 1991:26). Kenyataan ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan program seperti dalam program Takesra/Kukesra tidak bisa lagi hanya ditangani oleh satu instansi yaitu BKKBN saja, tapi harus melibatkan instansi lain yang terkait sehingga pola dan hubungan kerja bersifat lintas sektoral.

Untuk menciptakan koordinasi yang baik diperlukan teknik-teknik koordinasi. Menurut, Soewarno Handyaningrat (1995:124-127) bahwa teknik-teknik yang dapat dipakai melakukan koordinasi adalah:

1. Koordinasi melalui kewenangan
2. Koordinasi melalui consensus
3. Koordinasi melalui pedoman kerja
4. Koordinasi melalui suatu forum
5. Koordinasi melalui konferensi

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa:

- a. Koordinasi sebagai kegiatan untuk menyatupadukan gerak seluruh potensi dan unit-unit suatu organisasi yang berbeda fungsi agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan.
- b. Teknik koordinasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan program Takesra dan Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten DT. II Cianjur.
- c. Koordinasi yang digunakan dalam program Takesra dan Kukesra adalah koordinasi Eksternal yang bersifat Horizontal, dimana pelaksanaan koordinasinya bersifat keluar dan antara mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat kedudukan yang sama.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses koordinasi Eksternal dalam program Takesra/Kukesra dan hasil-hasil yang telah dicapai di Kec. Warung Kondang Kab. DT. II Cianjur.
2. untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program Takesra/Kukesra dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan sumber informasi guna melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara
2. Merupakan sumbangan yang bermanfaat bagi praktek koordinasi eksternal baik pada saat perumusan kebijakan maupun ketika implementasi kebijakan

pada kantor BKKBN dalam menjalankan Program Takesra/Kukesra menetapkan aturan yang lebih jelas tentang koordinasi baik pada level atas (Kantor BKKBN) maupun pada tingkat kecamatan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, observasi dan angket. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik purposive yaitu sampling bertujuan untuk mereka yang sesuai dengan peranannya terkait langsung dengan masalah yang diteliti, yaitu mereka yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, yaitu mereka yang terkait langsung dengan pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Kantor BKKBN dalam Program Takesra/Kukesra tersebut, sebanyak 8 responden data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan modus.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra di Kabupaten DT. II Cianjur dimulai sejak bulan April 1996 dengan sasaran jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebanyak 74.365 Kepala Keluarga, khusus Kecamatan Warung Kondang sasaran program sebanyak 4.673 Kepala Keluarga. Untuk program Takesra Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian realisasinya pada akhir 1997 sebesar 100% ditetapkan pada akhir bulan Juni tahun 1998 masing-masing 100%, 60% dan 10% ( sumber: Surat Bupati Daerah Tingkat II Cianjur No.476/1269/sos tanggal 18 Juni 1998, perihal Realisasi Penyerapan dan Tunggakan Dana Kukesra). Untuk wilayah Kecamatan Warung Kondang sasaran realisasi Kukesra dari tahap I sampai dengan III sebesar Rp 654.220.000,- dari 4.673 Kepala Keluarga, hal ini merupakan tantangan dari Pokjanis untuk itu perlu adanya kecepatan pelayanan terhadap pelaksanaan penyaluran tersebut.

Adapun ujung tombak pelayanan tersebut terletak pada pelayanan di Kantor Pos Pembantu yang berada ditiap-tiap kecamatan, tetapi hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena keterbatasan pegawai di KPP, yang rata-rata berjumlah 2 (dua) orang. Untuk itu perlu adanya tenaga bantuan dari pihak PLKB/PPLKB yang ada dikecamatan.

Untuk membahas lebih lanjut hasil penelitian ini, maka penulis sajikan pembahasan dengan menggunakan sistematika sesuai dengan teori koordinasi yang akan diuji di lapangan yaitu dalam pelaksanaan program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten DT II Cianjur, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam Upaya Meningkatkan Program Takesra/Kukesra Daerah Non IDT di Kec. Warung Kondang Kab. DT. II Cianjur (Entang Adhy Muhtar dkk.)**

1. Koordinasi melalui kewenangan

Dalam pelaksanaan Program Takesra/Kukesra Kepala kantor BKKBN memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Takesra/Kukesra termasuk didalamnya yang menyangkut penyusunan rencana operasional, melakukan orientasi, monitoring, bimbingan dan evaluasi serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab setiap unit/instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan 62,5% responden menyatakan kewenangan tersebut sudah jelas, baik pada substansi wewenang, instansi maupun pemilik wewenang. Kejelasan ini penting karena memperlihatkan kemampuan dan mengkoordinasikan sejumlah wewenang yang berbeda tersebut.

Namun demikian, kejelasan kewenangan tersebut belum menjamin efektivitas implementasi program tersebut. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor tersebut. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor berikut:

- (1) Karena kesibukan dari anggota Tim dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing.
- (2) Adanya kewenangan-kewenangan yang secara teknis operasional kadang-kadang memerlukan kejelasan lebih lanjut, sehingga mengakibatkan adanya sikap saling menunggu terhadap kerja operasional dilapangan.

Akibatnya, kepala kantor BKKBN terlalu mengutamakan pada target realisasi penyaluran dana Kukesra dan menomorduakan penyelesaian tunggakan Kukesra.

**Tabel.** Tentang Tunggakan Kukesra

Kukesra yang Disalurkan (Rp)	Tunggakan		% Tunggakan
	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	
120.398.075,-	14.041.584	180.775	11,81
	14.222.395,-		

**Sumber :** Laporan Kukesra Kantor BKKBN 1998

Dari tabel tersebut nampak bahwa jumlah tunggakan mencapai Rp 14.222.395,- atau 11,81% dari total Kukesra yang disalurkan, padahal sesuai dengan batas toleransi yang telah ditetapkan BKKBN tunggakan maksimal sebesar 5% dari total Kukesra.

Hak ini terjadi karena Kepala Kantor BKKBN mendapat kesulitan dalam menanggulangi tunggakan Kukesra tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya tanggungjawab yang diberikan kepada Kepala Kantor BKKBN untuk mengelola program-program pemerintah yang berhubungan dengan Keluarga Sejahtera lainnya selain Program Takesra/Kukesra.

2. Koordinasi melalui Konsensus

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesepakatan yang dibuat Kepala Kantor BKKBN bersama Tim Pokjanis untuk penyaluran dana Kukesra cukup baik

(62,5%). Namun demikian masih terdapat masalah kurangnya inisiatif Kepala Kantor BKKBN selalu koordinasi untuk mengimplementasikan consensus-konsensus tersebut. Akibatnya penyaluran dana Takesra/Kukesra tersendat dan tunggakan Kukesra macet. Hal ini terbukti terdapatnya kelompok yang menerima kucuran dana Kukesra berada ditempat yang jauh dengan pelayanan dana Kukesra. Akibatnya, kelompok tersebut mengalami hambatan dalam hal pengambilan dana Kukesra termasuk juga untuk membayar tunggakan Kukesra karena memerlukan biaya transfer yang cukup besar.

### 3. Koordinasi melalui pedoman kerja

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan juklak dilapangan oleh Kepala Kantor BKKBN selalu dilaksanakan (75%) namun ada beberapa juklak yang belum sepenuhnya dilaksanakan (25%). Adapun ada beberapa juklak yang telah diterapkan pelaksanaannya yaitu mengenai penyaluran dana Kukesra, pengambilan dana Kukesra dilakukan oleh ketua kelompok dengan membawa kartu KTP yang bersangkutan tanpa diwakilkan kepada orang lain. Namun pada saat ini penerapan pengambilan dana Kukesra oleh para kelompok banyak diwakilkan kepada pihak PPLKB/PLKB.

### 4. Koordinasi melalui forum

Walaupun Kepala Kantor BKKBN khususnya para PPLKB dan KLKBnya dilapangan disibukan oleh oleh kegiatan diluar Program Takesra/Kukesra tampaknya hal tersebut masih bisa di atasai dengan adanya konsultasi atau tukar menukar pendapat mengenai permasalahan tersebut dengan anggota Tim Pokjanis lainnya.

### 5. koordinasi melalui konferensi/pertemuan

Berdasarkan hasil data di lapangan bahwa Kepala kantor BKKBN dalam mengambil suatu keputusan telah berusaha bermusyawarah bersama dengan Tim Pokjanis Takesra/Kukesra hal ini terlihat dari hasil jawaban responden yang sebagian besar (75%) menjawab sekali selalu diputuskan bersama. Dari hasil pengamatan di lapangan kegiatan yang sebetulnya masih dapat diputuskan bersama tanpa harus diputuskan sendiri, walaupun kebutuhan lapangan tersebut tidak terlalu penting untuk dibicarakan/diselesaikan dalam perbedaan pendapat dari anggota Pokjanis.

Walaupun demikian bahwa penyelesaian pendapat yang berbeda diantara Tim Pokjanis oleh Kepala Kantor BKKBN selalu diselesaikan dalam suatu rapat koordinasi Takesra/Kukesra (87,5%). Dari hasil pembahasan menunjukan bahwa dari inti teknik koordinasi, telah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam aplikasinya masing-masing teknik baru mencapai 50%-75% artinya teknik-teknik tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak optimal, sehingga ada keterkaitan antara

kurangnya koordinasi dengan besarnya tunggakan KUT yang lebih dari 5% atau batas maksimal nilai tunggakan yang ditetapkan. Hal ini membawa implikasi bahwa, Kepala Kantor BKKBN melalui Pos Pembantu (KPP) di kecamatan dalam melayani penyaluran dana Kukesra belum optimal (87,5%).

Hal ini terjadi karena dari pihak Kantor Pos Pembantu (KPP) tidak pernah untuk meminta bantuan kepada petugas Kantor BKKBN di lapangan dikaenakan oleh msing-masing petugas ada perasaan segan untuk meminta bantuan.

Walaupun pengembalian angsuran Kukesra terus berjalan tetapi tunggakan tetap ada. Mengenai adanya, tunggakan Kukesra yang selama ini kian meningkat karena dari segi pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Kantor BKKBN hanya sebatas pada hasil laporan dari print out komputer yang dikeluarkan PT. Pos, tidak melakukan pemantauan langsung kepada kelompok-kelompok yang menunggak tersebut.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi eksternal terhadap Tim Pokjanis dalam pelaksanaan Program Takesra/Kukesra yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Kantor BKKBN masih merasa segan untuk menegur kepada anggota Tim Pokjanis sebagai petugas pelaksana pelayanan Program Takesra/Kukesra bagi para kelompok. Kurangnya tenaga pelaksana dari anggota Tim Pokjanis Takesra/Kukesra seperti halnya Kantor Pos Pembantu di Kecamatan berjumlah rata-rata 2 (dua) orang petugas pelaksana dari Bank BNI hanya ada 1 (satu) orang.
2. Terbatasnya tenaga pelaksana yang berada di Kabupaten, sehingga kecepatan pelayanan Program Takesra/Kukesra yang dilakukan tidak maksimal.
3. Kurangnya pengertian dari setiap anggota Tim Pokjanis terhadap anggota Tim Pokjanis lainnya sehingga timbul perbedaan pendapat yang akan menghambat kelancaran pelaksanaan Program Takesra/Kukesra.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Program Takesra/Kukesra, yaitu:

1. Untuk mengatasi sikap segan dalam menegur anggota Tim Pokjanis mengenai keterlambatan penyaluran dana Kukesra, dilakukan langkah pendekatan dengan cara bertukar pendapat dalam sebuah rapat koordinasi tentang penyebab dari keterlambatan tersebut.
2. Memerintahkan mengarahkan petugas dilapangan melalui PPLKB dan PLKB supaya ikut membantu dalam tugas pelayanan yang dilaksanakan di setiap Kantor Pos Pembantu (KPP) di tingkat Kecamatan.
3. Mengoptimalkan pemahaman mengenai petunjuk pelaksanaan Program Takesra/Kukesra, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi diantara anggota Tim Pokjanis di lapangan dapat diluruskan dengan penerapan Juklak sebagai pedoman untuk berpijak dan bertindak dalam pelaksanaan Program Takesra/Kukesra.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Kantor BKKBN belum dilaksanakan sesuai dengan teknik-teknik koordinasi. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indicator: Bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal melalui kewenangan belum dilaksanakan secara optimal karena kepala BKKBN masih anggota Tim Pokjanis yang belum melakukan tugas dan tanggungjawabnya akan pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Demikian juga koordinator melalui konsensus pedoman kerja terutama menyangkut tentang pengambilan dana Kukesra oleh para kelompok yang diwakilkan kepada petugas Lapangan Keluarga Berencana.
2. Kecepatan penyaluran dana Takesra/Kukesra oleh Kepala Kantor BKKBN masih lemah dalam pelayanannya, hal ini terlihat dari kucuran dana Kukesra bagi kelompok yang lokasinya jauh kadang-kadang penyampaiannya terlambat.
3. Pelaksanaan koordinasi ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat yaitu bahwa Kepala Kantor BKKBN masih merasa segan untuk menegur kepada anggota Tim Pokjanis (PT. Pos dan Bank BNI) kurangnya tenaga pelaksana dari anggota Tim Pokjanis khususnya petugas pelayanan dilapangan sehingga timbul perbedaan pendapat yang berkait pada pelaksanaan dilapangan. Adapun upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan langkah pendekatan dengan cara bertukar pikiran/pendapat yang dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi. Memerintahkan dan mengarahkan PPLKB PLKB untuk membantu petugas pelayanan di KPP. Mengoptimalkan pemahaman mengenai petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Takesra/Kukesra.

### **Saran-Saran**

1. Perlunya peningkatan frekwensi rapat koordinasi sebagai wahana untuk berkomunikasi dan menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga perbedaan-perbedaan pendapat di antara anggota Tim Pokjanis dapat diselesaikan dengan menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh anggota lainnya.
2. Kepala Kantor sebaiknya menciptakan suatu jaringan kerja yang dapat meningkatkan kerjasama yang lebih konstruktif untuk ikut membantu dalam memantau/memonitoring program tersebut baik dengan bawahannya langsung maupun aparat dengan instansi lainnya serta dengan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Hasil penelitian koordinasi Program Kukesra/Takesra ini dapat dijadikan feed back sekaligus bahwa informasi bagi para teroris (peneliti lainnya) sehingga

diharapkan adanya pengkajian dan penelitian lebih lanjut dari variabel lainnya seperti aspek perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan yang belum teridentifikasi sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Handayani, Soewarno. 1995. *Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Mc. Farland, DE. 1959. *Management Principles and Practices*. Mc. Millan Co, New York.
- Piffner, John M. and Robert. V. Presthuss. 1960. *Public administration*. The Rolland Press Company, New York.
- Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Intermedia, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan koordinasi Pemerintah di Daerah Bandung*. Citra Aditia Bakti.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Sumodingrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1995. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung.
- UU RI No. 10 Tahun 1992. *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. BKKBN. Jakarta.
- Petunjuk Bersama Pelaksanaan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra). 1997. BKKBN, Jakarta.